

BAB I

PENDAHULUAN

Secara umum, tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dan menjabarkan tentang latar belakang hal-hal yang mendasari hubungan kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan negara Pasifik Selatan bagian Melanesia. Baik dalam kerja sama politik maupun ekonomi, serta pencegahan dukungan separatisme Papua dari Indonesia.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara dan merupakan negara yang memiliki wilayah paling luas. Wilayah Indonesia berukuran 1.990.250 km² dan memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang mana hanya kurang lebih 7.000 pulau saja yang ditinggali dan 16.000 sudah tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (thejakartapost, 2017).

Perairan Indonesia memiliki luas perairan yang lebih dari pada luas daratan dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia adalah negara yang menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai pemilik garis pantai paling panjang di dunia, yakni sekitar 81.900 km² (Indonesia H. P., 2017).

Angka etnis di Indonesia sangatlah beragam karena negeri ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam keanekaragaman suku dan budaya yang ada, etnis Melanesia turut hidup di tanah yang sama dengan warga negara Indonesia di bagian timur dan tersebar di lima provinsi yang ada di Indonesia yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Sebagai wujud dari keseriusan gagasan tersebut, banyak jalinan kerja sama yang

dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. Salah satunya adalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara lain adalah relasi dengan negara-negara di wilayah Pasifik Selatan.

Negara Pasifik Selatan adalah sebuah kawasan yang berada di timur Indonesia. Pasifik Selatan terdiri dari negara pulau dan negara kepulauan hingga sering mendapat sebutan Baskom Pasifik (*pacific rim*). Negara-negara di Pasifik Selatan terbagi menjadi tiga wilayah, yakni Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia. Polinesia terdiri dari lebih dari seribu kepulauan yang tersebar di Samudera Pasifik bagian tengah dan selatan. Yang mewakili daerah ini adalah Hawaii, Selandia Baru, Tuvalu, Tonga, dan Samoa. Mikronesia memiliki delapan negara yang membentuknya, yaitu Kiribati, Guam, Micronesia, Nauru, Palau, Kepulauan Marshall, Kepulauan Mariana Utara, dan Kepulauan Wake. Sementara Melanesia terbentuk atas kelompok pulau yang berada di sebelah timur laut dari perairan Australia, yaitu Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, Fiji, dan Vanuatu.

Indonesia telah lama menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Awal mula hubungan Indonesia dengan Pasifik Selatan dimulai dengan terjalinnya kerja sama diplomatik dengan Fiji di tahun 1974 (FIJIEMBAJAK, 2019). Dewasa ini, hubungan Indonesia dengan negara Pasifik Selatan semakin digiatkan. Tak hanya pada kawasan Melanesia saja, tetapi Polinesia dan Mikronesia juga terlibat. Kerja sama ini tidak hanya meliputi ekonomi dan politik, tetapi juga perlindungan perubahan iklim yang dampaknya begitu besar terjadi di negara-negara Pasifik Selatan.

Papua merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, terletak pada bagian paling timur. Daerah ini sangat rawan oleh pertikaian dan kasus gerakan separatisme yang menginginkan kemerdekaannya dari Indonesia. Keinginan ini didukung oleh negara-negara Pasifik Selatan, khususnya Melanesia.

Dikarenakan kedekatan geografis dan kesamaan ras, kelompok negara ini memberikan dukungan secara langsung pada kemerdekaan Papua. Perdana Menteri Vanuatu, Moana Kalosil, menyatakan bahwa suara rakyat Papua diabaikan oleh internasional, yang membuat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) semakin kentara menindas rakyat sejak tahun 1969 (freewestpapua, 2014). Vokalnya kelompok negara ini perlu diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia karena merupakan sebuah ancaman kedaulatan.

Kepentingan negara Melanesia yang memberi dukungan terhadap kemerdekaan Papua dipengaruhi oleh politik domestik negara-negara Melanesia dan orientasi kekuasaan dan pembebasan ras dari kejahatan pelanggaran HAM (Putnam, 1988).

Namun, tidak semua negara Melanesia menjadi pendukung lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dua negara yang tergabung dalam Melanesia, Fiji dan Papua Nugini, menyatakan tidak setuju Papua melepaskan diri dari NKRI karena menilai terlalu mencampuri kedaulatan negara lain.

Negara-negara Melanesia tergabung dalam sebuah kelompok bernama *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Pada bulan Maret tahun 2011, terselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG yang ke-18 di Fiji. Di konferensi tersebut, diterimalah Indonesia menjadi anggota dan mendapat bagian *Observer* (Indonesia K. L., 2019). Hal ini memicu perang mulut antara Fiji dan Kepulauan Solomon. Pihak Kepulauan Solomon menuding Fiji meminta secara paksa anggota MSG yang lain untuk menerima Indonesia sebagai anggota resmi. Hal ini dianggap akan menghambat persiapan separatisme Papua dari Indonesia. Seorang tokoh oposisi menilai bahwa Indonesia menjajah Melanesia di Papua. Ia berkata, bila Indonesia tidak didepak dari MSG, maka lebih baik kelompok tersebut dibubarkan (DW, 2018).

Meski adanya pihak yang mendukung gerakan separatisme wilayah Papua terhadap Indonesia, Indonesia tidak serta-merta melepaskan kerja sama dengan negara-negara Melanesia, melainkan semakin memperkuat hubungan kerja sama yang telah terjalin selama lebih dari 40 tahun tersebut. Bahkan, negara Vanuatu yang sangat vokal mendukung gerakan separatisme Papua pun hendak mendirikan kedutaan besarnya di Indonesia untuk membicarakan isu teknis, ekonomi, dan agrikultur (Sari, 2015).

Namun, rupanya hal tersebut tidak menghentikan sebagian negara Melanesia memberikan dukungannya terhadap merdekanya Papua dari NKRI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah, ***“Mengapa Indonesia belum mampu mengurangi dukungan beberapa negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap gerakan separatisme Papua?”***

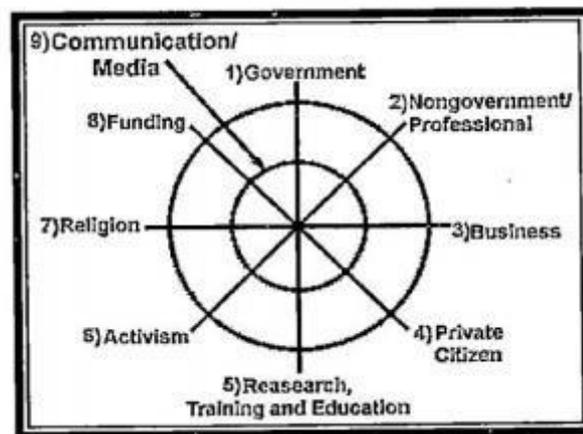
C. Kerangka Pemikiran

Untuk meneliti karya tulis ini, digunakan adalah Diplomasi Multilajur (*Multi-track*) dan Teori Deprivasi Relatif.

1. Diplomasi Multijalur (Multi-track diplomacy)

Multi-track diplomacy atau diplomasi multijalur adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh John W. McDonald dan Louise Diamond. Konsep ini merupakan sebuah pengembangan dari pembeda antara *first-track diplomacy* atau jalur resmi yang dilakukan pemerintah dan *second-track diplomacy* atau jalur yang tidak resmi yang dilaksanakan non-pemerintah, yang dikembangkan oleh Joseph Montville. Diamond dan McDonald kemudian memecah jalur itu menjadi sembilan jenis. Kesembilan jalur itu terdiri dari: pemerintah, bisnis, masyarakat, penelitian, pendidikan dan latihan,

aktivisme, pemberi dana, agama, opini publik atau media, dan ahli penyelesaian masalah (Luhulima, 2007). Setelah dikembangkan, pendekatan ini mampu menunjukkan bahwa hubungan antara semua lintasan ada di tingkatan yang sama, sehingga setiap jalur bisa digunakan untuk menjadi jalan menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun, menurut McDonald, jalur-jalur itu akan timpang bila tidak dilalui sebagian atau semuanya. Diamond menyebutkan, “*system approach to peace. No one track, by itself, can build a peace process that will last.*” (Diamond & McDonald, 1996).



Gambar 1.1. Sembilan jalur *Multi-track Diplomacy*

Diplomasi Multijalur dilakukan atas dasar kesadaran aktor non-negara secara luas dari semua kalangan dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda-beda demi melakukan usaha *peacebuilding* dan *peacemaking* (Diamond & McDonald, 1996). Diplomasi ini juga merupakan upaya untuk melibatkan waga negara dari berbagai kalangan dalam sebuah hubungan guna mewujudkan keadilan dan persahabatan antar masyarakat lokal maupun mancanegara menuju perdamaian dunia.

2. Teori Deprivasi Relatif

Deprivasi relatif adalah situasi di mana seseorang mengalami kesenjangan, kehilangan, kekurangan terhadap sesuatu tertentu, dan ketidakpuasan pada keadaan diri dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat menciptakan sudut pandang baru bagi suatu kelompok yang merasakan ketidakadilan.

Teori ini mulanya dikemukakan oleh Samuel Stouffer yang berkata bahwa hidup manusia didasari oleh pengalaman kelompok dan individu dalam kondisi kurang beruntung (*disadvantage*) dan kekurangan (*deprivasi*), kemudian dikembangkan oleh James Allan Davis yang mendefinisikan deprivasi relatif sebagai persepsi terhadap keberadaan perbedaan (*discrepancy*) antara realitas dan harapan (Sarwono, 2009).

Tindakan kekerasan massa, revolusi, dan politik sering didasari dengan rasa ketidakpuasan. Deprivasi relatif dipersepsikan antara nilai harapan (*value expectation*) dan nilai kemampuan (*value capabilities*). Deprivasi relatif juga bisa disinonimkan dengan perasaan frustrasi (Gurr, 1970) yang kemudian membuat individu maupun kelompok melakukan protes-protes, baik dalam bentuk konstruktif maupun destruktif.

Deprivasi relatif bisa diformulasikan sebagai berikut. Bila seseorang:

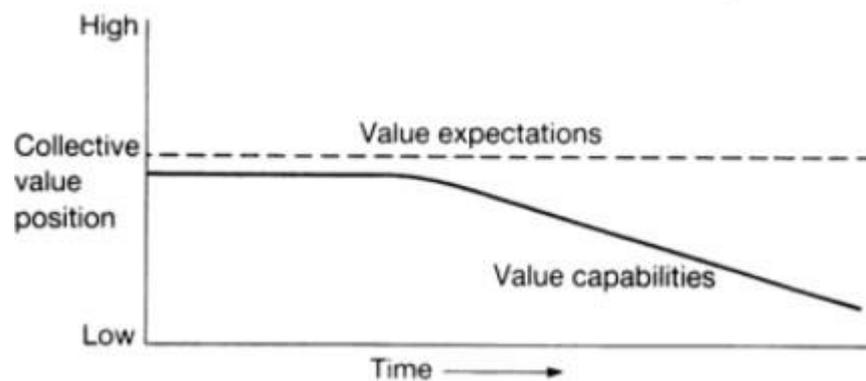
- a. tidak memiliki X,
- b. mengetahui orang lain memiliki X,
- c. timbul rasa iri dan juga menginginkan X,
- d. dia merasa mampu mendapatkan dan memiliki X.

Deprivasi dibagi menjadi dua, yakni *fraternal deprivation* dan *egoistical*. Deprivasi fraternal akan terjadi saat individu memandang kondisi kelompoknya lebih buruk dibanding kelompok lain. Sementara deprivasi egoistikal terjadi ketika individu merasa lebih buruk kondisinya bila dibanding orang lain dalam kelompoknya. Bila

seseorang mengalami keduanya dalam satu waktu, tandanya ia merasakan *double deprived* (Runciman & Bagley, 1969).

Deprivasi relatif terbagi menjadi tiga jenis:

- a. *Decremental Deprivation*, terjadi ketika nilai harapan dan nilai kemampuan pada awalnya berjalan sejajar, tetapi nilai kemampuan mengalami penurunan dan nilai harapan tetap berada di posisi semula, sehingga jarak antara kedua nilai tersebut semakin besar, terjadinya *decremental deprivation* kemudian mengakibatkan keadaan seperti resesi ekonomi, kemunduran pada sejumlah kesempatan, misalnya pencarian ketenagakerjaan yang tidak maksimal karena tenaga kerja tidak berpendidikan, penetapan peraturan, depresi, dan perasaan tidak aman (Dayaksini & Hudaniah, 2015).

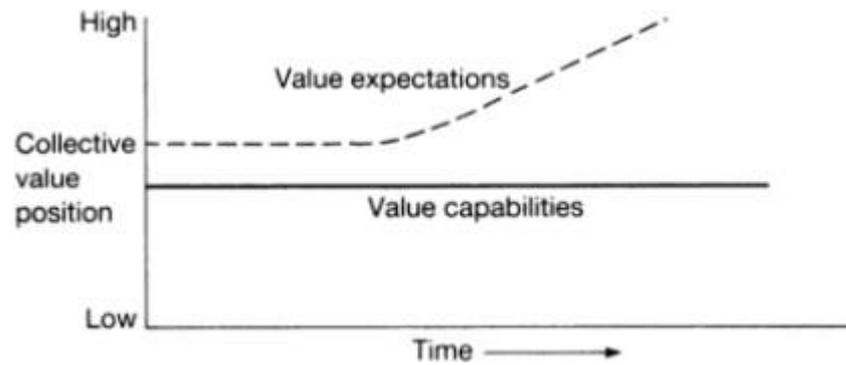


Gambar 1.2. Bagan *decremental deprivation*

Deprivasi jenis ini merupakan yang paling sering terjadi di komunitas sosial (Gurr, 1970).

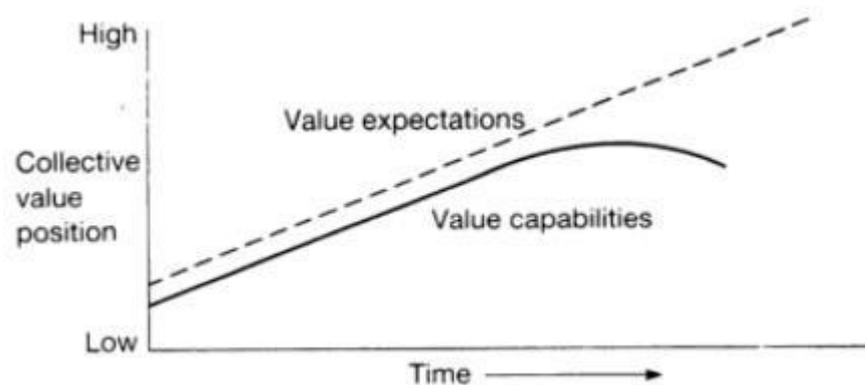
- b. *Aspirational Deprivation*, terjadi kala kedua nilai yang sebelumnya berjalan sejajar kemudian berubah kala nilai harapan meningkat, tetapi nilai kemampuan masih konstan. Dalam konteks ini, seseorang tidak akan merasakan kehilangan terhadap sesuatu, tetapi mereka akan marah karena

tidak memiliki sarana-prasarana untuk memenuhi harapannya tersebut. Harapan itu bisa berbentuk komoditas berupa benda, kebebasan keinginan berpartisipasi, keadilan dan kesamarataan dalam kelas sosial, maupun komitmen-komitmen lainnya.



Gambar 1.3. Bagan *aspirational deprivation*

- c. *Progressive Deprivation*, terjadi saat kedua nilai berada di posisi yang sama dan seiring waktu nilai harapan meningkat, sementara nilai kemampuan mengalami penurunan.



Gambar 1.4. Bagan *progresive deprivation*

D. Hipotesa

Dengan berdasar dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran, jawaban sementara yang dapat ditarik untuk menjawab mengapa Indonesia belum mampu mengurangi dukungan beberapa negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap gerakan separatisme Papua adalah Indonesia belum secara optimal melakukan *multi-track diplomacy* dengan menggunakan aktor-aktor negara dalam memoderasi aksi separatisme dan Indonesia belum mampu mengendalikan sentimen etnis yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan kesenjangan dirasakan oleh negara anggota kelompok MSG, terutama Vanuatu, terhadap etnis Melanesia di Papua.

E. Tujuan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Mengetahui tentang gerakan separatisme Papua dan sikap *Melanesian Spearhead Group (MSG)*
- c. Mengetahui tentang kepentingan Indonesia menjalin kerja sama dengan MSG

F. Jangkauan Penelitian

Agar tidak menjadi pembahasan yang meluas, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hubungan Indonesia dan Pasifik Selatan bagian Melanesia yang juga tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* pada tahun 2014-2019 yang mana merupakan di bawah kepemimpinan akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan awal Presiden Joko Widodo. Selain itu, pemilihan atas negara-negara di Melanesia adalah karena kelompok negara tersebut memiliki geografis yang paling dekat dengan Indonesia dari pada kedua kelompok negara lainnya.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Guna mengumpulkan penjelasan masalah dan pencarian detail fakta dalam penelitian, digunakan metode deskriptif.

2. Jenis Data

Jenis data yang termuat dalam penelitian dikumpulkan melalui buku, jurnal, situs daring resmi, dan media massa yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yakni sumber kepustakaan (*library research*)

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II membahas tentang Melanesia dan *Melanesian Spearhead Group*

Bab III membahas tentang profil, sejarah, dan adanya gerakan separatisme di Papua dan pandangan tiap negara MSG tersebut mengenai dukungan gerakan separatisme Papua.

Bab IV akan membahas analisa hubungan diplomatik Indonesia dan MSG

Bab V adalah kesimpulan.